



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/IV/461/12/2016

Ketua Surat : **KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM** Nomor : **258/A.4-II/XII/2016**
Tanggal : **24 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Dasar Hukum** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dimohonkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama : **SUKMAWATI TRI YULIASARI** NIP/NIM : **20130610201**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Jalan : **PELAKSANAAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN**
Kecamatan : **PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA**
Kabupaten : **YOGYAKARTA**
Instansi : **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) PERWAKILAN DIY**
Surat : **27 DESEMBER 2016 s/d 27 MARET 2017**

Ketentuan
Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbng.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah ditahkan dan dibubuhi cap institusi;
Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
Ijin penelitian dapat dipermanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbng.jogjapro.go.id;
Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **27 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



- Daftar Pengiriman**
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
 2. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) PERWAKILAN DIY
 3. KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
 4. YANG BERSANGKUTAN



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Surat Keterangan
No. 0001/ORL.Pwk-KT/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budhi Masthuri
Jabatan : Kepala Ombudsman RI Perwakilan D.I.Yogyakarta
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 20, Yogyakarta

Menerangkan:

Nama : Sukmawati Tri Yuliasari
NIM : 20130610201
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan D.I.Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2017 - 4 April 2017 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2017

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Budhi Masthuri
Kepala

DATA LAPORAN/PENGADUAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DIY

TAHUN 2014-2016

1. Jumlah Laporan/Pengaduan yang masuk ke ORI DIY

Kota Yogyakarta				
No.	Cara Pengaduan	Jumlah/Tahun		
		2014	2015	2016
1	Datang Langsung	30	20	23
2	Surat	8	12	5
3	Email	1	0	1
4	SMS	2	0	6
5	Media	0	2	6
6	Telepon	2	0	0
Total		43	34	41

2. Jenis Pelapor

Kota Yogyakarta				
No.	Jenis Pelapor	Jumlah/Tahun		
		2014	2015	2016
1	Perorangan	34	29	27
2	Organisasi	7	3	8
3	Inisiatif	2	2	6
Total		43	34	41

3. Instansi Terlapor

Kota Yogyakarta				
No.	Instansi Terlapor	Jumlah/Tahun		
		2014	2015	2016
1	Badan Pertanahan Nasional	1	3	2
2	BUMN/BUMD	8	10	8
3	Kejaksaan	2	4	1
4	Kementerian	6	5	3
5	Kepolisian	3	3	4
6	Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural	2	2	1
7	Lembaga Peradilan	3	1	1
8	Pemerintah Kabupaten/Kota	2	2	8
9	Pemerintah Provinsi	4	0	7
10	Sekolah	7	4	6
11	Perguruan Tinggi	3	0	0
12	Asuransi	1	0	0
13	Pemerintah Desa	1	0	0
Total		43	34	41

4. Substansi/Bidang Laporan

Kota Yogyakarta		Jumlah/Tahun		
No.	Substansi/Bidang Laporan	2014	2015	2016
1	Administrasi Kependudukan	1	1	0
2	Agama	0	1	0
3	Air Minum	0	0	1
4	Asuransi/Jaminan Sosial	1	0	5
5	Cukai dan Pajak	0	0	1
6	Imigrasi	1	0	0
7	Informasi Publik	1	1	0
8	Kejaksaan	1	3	1
9	Kepegawaian	4	3	1
10	Kepolisian	4	3	4
11	Kesehatan	2	3	4
12	Ketenagakerjaan	0	1	0
13	Komisi dan Lembaga Negara	1	0	0
14	Lembaga Masyarakat	0	0	1
15	Lingkungan Hidup	0	1	0
16	Pelayanan TKI	0	1	0
17	Pemukiman dan Perumahan	0	1	1
18	Penanaman Modal	1	0	0
19	Pendidikan	14	5	7
20	Peradilan	3	1	1
21	Perbankan	2	0	2
22	Perdagangan dan Industri	1	0	1
23	Perhubungan/Infrastruktur	2	4	4
24	Perizinan/PTSP	1	0	1
25	Pertanahan	1	3	2
26	Sumber Daya Alam dan Energi	2	1	1
27	Telekomunikasi	0	1	3
Total		43	34	41

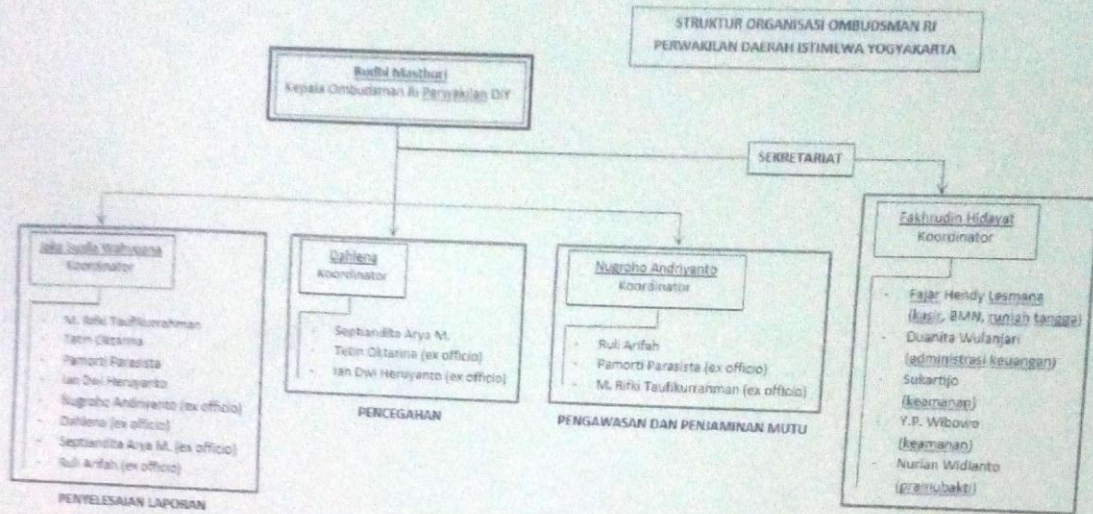
5. Status Laporan

Kota Yogyakarta		Jumlah/Tahun		
No.	Status Laporan	2014	2015	2016
1	Laporan Masuk	43	34	41
2	Laporan Selesai	30 (69,8%)	29 (85,3%)	28 (68,3%)
3	Proses	13 (30,2%)	5 (14,7%)	13 (31,7%)

**KEGIATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
DIY di KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2016**

No. Kegiatan		Kota Yogyakarta		
		Jumlah/Tahun		
		2014	2015	2016
1	Diskusi dan Kajian	5	12	13
2	Talkshow Radio	0	0	6
3	Workshop dan Pelatihan	4	7	9
4	Menghadiri pertemuan dan Rapat Kerja	4	9	7
5	Sosialisasi Pengenalan Ombudsman	1	0	4
6	Investigasi Laporan	7	4	14
7	Monitoring	8	5	3
8	Pembentukan Sahabat Ombudsman	0	1	0
9	Survei Kepatuhan	1	1	1
Total		30	39	57

7. Struktur Organisasi (Februari 2017)



Yogyakarta, 04 April 2017


Ian Dwi Heruyanto
 Calon Asisten Ombudsman RI
 PERWAKILAN DIY